

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Nilai Tukar Mata Uang

2.1.1. Pengertian Nilai Tukar Mata Uang

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang antara dua negara adalah harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain.

Fabozzi dan Modigliani (1995) mendefinisikan nilai tukar mata uang sebagai jumlah dari mata uang suatu negara yang dapat ditukarkan per unit mata uang negara lain, atau dengan kata lain harga dari satu mata uang terhadap mata uang lain.

Sedangkan, Abimanyu (2004) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain, dan oleh karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara kedua negara tersebut dimana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.

Mata uang suatu negara dapat ditukarkan atau diperjualbelikan dengan mata uang negara lainnya sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar mata uang atau yang sering disebut dengan pasar valuta asing.

Dengan perubahan kondisi ekonomi serta sosial politik yang terjadi di suatu negara, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dapat berubah secara substansial. Mata uang suatu negara dikatakan mengalami apresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang negara lain mengalami kenaikan. Sebaliknya, mata uang suatu negara dikatakan mengalami depresiasi jika nilai tukarnya relatif terhadap mata uang negara lain mengalami penurunan.

Dalam kondisi tertentu, kenaikan dan penurunan nilai tukar mata uang terjadi atas intervensi pemerintah, dalam hal ini kebijakan bank sentral dalam menaikkan dan menurunkan nilai tukar mata uang domestik untuk menyesuaikannya dengan nilai tukar mata uang yang sebenarnya di pasar. Penyesuaian ke atas atau kenaikan nilai

tukar mata uang yang dilakukan oleh bank sentral disebut dengan revaluasi. Sedangkan, penyesuaian ke bawah atau penurunan nilai tukar mata uang yang dilakukan oleh bank sentral disebut dengan devaluasi.

2.1.2. Nilai Tukar Mata Uang Nominal dan Riil

Secara ekonomi, nilai tukar mata uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Mankiw, 2007):

a. Nilai tukar mata uang nominal

Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara. Istilah 'nilai tukar mata uang' antara dua negara yang diberlakukan di pasar valuta asing adalah nilai tukar mata uang nominal ini.

b. Nilai tukar mata uang riil

Nilai tukar mata uang riil adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang riil menyatakan tingkat harga dimana kita bisa memperdagangkan barang dari satu negara dengan barang negara lain.

Nilai tukar mata uang riil ini ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan tingkat harga domestik dan luar negeri. Rumusnya adalah sbb. (Mankiw, 2007, p.133):

$$\text{nilai tukar mata uang riil} = \frac{\text{nilai tukar mata uang nominal} \times \text{harga barang domestik}}{\text{harga barang luar negeri}}$$

Dengan demikian, nilai tukar mata uang riil bergantung pada tingkat harga barang dalam mata uang domestik serta nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Jika nilai tukar mata uang riil dari mata uang domestik tinggi, maka harga barang-barang di luar negeri relatif lebih murah dan harga barang-barang di dalam negeri relatif lebih mahal. Sebaliknya, jika nilai tukar mata uang riil dari mata uang domestik rendah, maka harga barang-barang di luar negeri relatif lebih mahal dan harga barang-barang di dalam negeri relatif lebih murah.

2.1.3. Sistem Nilai Tukar Mata Uang

Konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem nilai tukar mata uang atau yang dikenal dengan rezim nilai tukar mata uang (*exchange rate regime*) mulai mendapat perhatian besar dari para ahli ekonomi sejak akhir Periode Bretton Woods pada tahun

1971, serta setelah terjadinya serangkaian krisis nilai tukar mata uang di beberapa negara, baik di negara maju maupun negara berkembang, hingga tahun 1973. Hal ini kemudian melahirkan suatu konsep dalam ekonomi yang disebut dengan *Impossible Trinity*. Konsep *Impossible Trinity* menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara simultan mencapai tiga sasaran kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai tukar (*exchange rate stability*), independensi kebijakan moneter (*monetary independence*), dan integrasi kepada pasar keuangan dunia (*full financial integration*). Oleh karena itu, suatu negara harus menentukan sistem dan kebijakan nilai tukar mata uangnya yang sesuai untuk dapat mencapai sasaran kebijakan moneter yang dipilihnya.

Berdasarkan kebijakan tingkat pengendalian nilai tukar mata uang yang diterapkan suatu negara, sistem nilai tukar mata uang secara umum dapat digolongkan menjadi empat kategori, yaitu (Madura, 2008):

a. Sistem nilai tukar mata uang tetap (*fixed exchange rate system*)

Dalam sistem nilai tukar mata uang tetap, nilai tukar mata uang akan diatur oleh otoritas moneter untuk selalu konstan atau dapat berfluktuasi namun hanya dalam suatu batas yang kecil. Dalam hal ini, otoritas moneter memelihara nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada nilai tertentu dengan cara membeli atau menjual mata uang asing untuk mata uang domestik pada harga yang tetap.

Dengan sistem ini, dunia usaha akan diuntungkan oleh karena resiko fluktuasi nilai tukar mata uang dapat dikurangi, sehingga hal ini dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi internasional. Namun demikian, dengan sistem ini tetap terdapat resiko dimana pemerintah dapat melakukan perubahan nilai tukar mata uang yang diberlakukan dengan melakukan devaluasi atau revaluasi, terutama saat nilai tukar mata uang tersebut di pasar mengalami perubahan yang besar. Dengan hal ini, secara makro, negara dan dunia usaha akan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi yang terjadi di negara lain.

b. Sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas (*free floating exchange rate system*)

Dalam sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Berbeda dengan sistem nilai tukar mata uang tetap, dengan sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas fluktuasi nilai mata uang dibiarkan sehingga nilainya sangat

fleksibel. Dalam sistem ini, otoritas moneter diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan moneter secara independen tanpa harus memelihara nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada nilai tertentu.

Dengan sistem ini, negara akan terhindar dari inflasi terhadap negara lain serta masalah-masalah ekonomi yang dialami suatu negara tidak akan mudah untuk menyebar ke negara lain. Selain itu, dengan sistem ini, seperti yang telah disebutkan di atas, otoritas moneter tidak perlu memelihara nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada nilai tertentu, sehingga otoritas moneter dapat berfokus pada kebijakan-kebijakan moneter yang membawa dampak positif pada perekonomian. Namun demikian, dengan sistem ini, nilai tukar mata uang akan selalu berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar sehingga terdapat resiko ketidakpastian nilai tukar yang dihadapi oleh dunia usaha.

- c. Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali (*managed float exchange rate system*)

Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar mata uang tetap dan nilai tukar mata uang mengambang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dibiarkan berfluktuasi setiap waktu tanpa ada batasan nilai yang ditetapkan. Namun demikian, pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk mencegah nilai tukar mata uang berubah terlalu jauh.

- d. Sistem nilai tukar mata uang terikat (*pegged exchange rate system*)

Dalam sistem nilai tukar mata uang terikat, nilai tukar mata uang domestik diikatkan atau ditetapkan terhadap satu atau beberapa mata uang asing, biasanya dengan mata uang asing yang cenderung stabil misalnya dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing selain dolar Amerika Serikat akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Namun demikian, oleh karena nilai tukar dolar Amerika Serikat yang cenderung stabil, maka nilai tukar mata uang domestik pun cenderung stabil terhadap mata uang asing lainnya.

Dalam hal pemilihan sistem nilai tukar mata uang yang sesuai dengan perekonomian suatu negara, Goeltom dan Zulferdi (1998) menjelaskan beberapa pertimbangan yang dapat digunakan dalam pemilihan sistem nilai tukar mata uang dalam suatu negara, antara lain:

- a. Preferensi suatu negara terhadap keterbukaan ekonominya, apakah suatu negara lebih cenderung menerapkan kebijakan ekonomi yang terbuka atau tertutup. Apabila suatu negara lebih cenderung menerapkan sistem ekonomi yang tertutup dan mengisolasi gejala keuangan dari negara lain, maka sistem nilai tukar mata uang tetap dapat menjadi pilihan utama. Sebaliknya apabila suatu negara lebih cenderung menerapkan sistem ekonomi yang terbuka, maka sistem nilai tukar mata uang yang lebih fleksibel yang menjadi pilihan utama.
- b. Tingkat kemandirian suatu negara dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Misalnya, dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang independen, suatu negara lebih baik memilih sistem nilai tukar yang fleksibel sebagai pilihan utama.
- c. Kegiatan perekonomian suatu negara. Jika kegiatan perekonomian suatu negara semakin besar maka volume transaksi ekonomi meningkat sehingga permintaan uang akan bertambah. Dalam hal ini, sistem yang tepat digunakan adalah sistem nilai tukar fleksibel, karena jika negara tersebut memiliki sistem nilai tukar tetap akan dibutuhkan cadangan devisa yang sangat besar untuk menjaga kredibilitas sistem nilai tukar.

2.1.4. Perkembangan Sistem Nilai Tukar Mata Uang di Indonesia

Di Indonesia, sejak tahun 1966 hingga sekarang telah diterapkan empat sistem nilai tukar mata uang yang berbeda yang terbagi menjadi beberapa periode waktu. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, menetapkan sistem nilai tukar mata uang berdasarkan berbagai pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kondisi ekonomi saat itu. Perry dan Solikin (2003) memaparkan sistem nilai tukar mata uang yang berlaku di Indonesia:

- a. Sistem nilai tukar mata uang berganda (*multiple exchange rate system*)
Sistem nilai tukar mata uang ini diterapkan sejak Oktober 1966 sampai dengan Juli 1971. Penggunaan sistem ini dimaksudkan untuk menghadapi fluktuasi nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi dua digit selama periode tersebut.
- b. Sistem nilai tukar mata uang tetap (*fixed exchange rate*)
Sistem nilai tukar mata uang ini berlaku sejak Agustus 1971 sampai dengan Oktober 1978. Dengan sistem ini nilai rupiah ditetapkan dalam suatu nilai tetap terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu US\$1 = Rp.415,00. Permemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya neraca pembayaran dalam kurun waktu tersebut. Neraca

pembayaran yang kuat disebabkan oleh besarnya penerimaan dari sektor migas yang meningkatkan cadangan devisa. Hal ini juga didukung oleh tingginya harga minyak mentah dunia dimana saat itu disebut-sebut sebagai masa keemasan minyak.

c. Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali (*managed floating exchange rate*)

Sistem nilai tukar mata uang ini diterapkan sejak November 1978 sampai dengan Agustus 1997. Pada periode ini nilai rupiah tidak hanya dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat namun juga beberapa mata uang asing lainnya. Pada masa ini telah terjadi tiga kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar riil yang lebih baik. Pada masa ini sistem nilai tukar mata uang dibagi menjadi tiga periode waktu, yaitu:

c.1. Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali I (*managed floating exchange rate I*) periode tahun 1978 – 1986

Pada periode ini terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak terlalu besar, yaitu berkisar antara Rp.625,38 hingga Rp.1.644,10. Pada periode ini didominasi oleh ketidakpastian manajemen Bank Indonesia dibandingkan ketidakpastian *floating* itu sendiri karena pada masa ini perekonomian belum terlalu berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan nilai nominal rupiah yang relatif tetap dan perubahan relatif baru terjadi di tahun-tahun terakhir saat terjadi devaluasi.

c.2. Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali II (*managed floating exchange rate II*) periode tahun 1987 – 1992

Pada periode ini juga rupiah mengalami devaluasi, yaitu sekitar Rp.1.644,10 hingga Rp.2.053,40. Namun pada masa ini unsur *floating* mata uang lebih mendominasi daripada manajemen Bank Indonesia dalam melakukan intervensi. Strategi ini dimaksudkan untuk menjada daya saing produk ekspor melalui pergerakan nilai mata uang dalam kisaran yang sempit.

c.3. Sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali dengan *crawling band system* (*managed floating exchange rate with crawling band system*) periode tahun 1992 – 1997

Pada periode ini *floating* semakin diperlakukan dalam kisaran yang lebih lebar, yaitu sekitar Rp.2.053,40 hingga Rp.2.791,30. Pada bulan September 1992, Bank Indonesia menetapkan rentang intervensi Rp.10,00 dengan batas bawah Rp.2.035,00 dan batas atas Rp.2.045,00. Kemudian pada bulan Juli 1997, Bank Indonesia memperlebar rentang intervensi sebesar Rp.304,00 dengan batas bawah Rp.2.378,00 dan batas atas Rp.2.682,00. Dengan demikian, Bank Indonesia telah melakukan pelebaran *band intervention* secara bertahap yang kemudian menghapus *band intervention* tersebut pada akhir periode ini sehingga nilai rupiah menjadi lebih *floating*.

- d. Sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas (*free floating exchange rate*) periode tahun 1998 – sekarang

Sistem ini diberlakukan sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing semata-mata hanya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang nilainya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada awal penerapannya, sistem nilai tukar mata uang ini menimbulkan gejolak yang berlebihan (*overshooting*), dimana nilai tukar rupiah berfluktuasi amat cepat. Banyak faktor yang akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah merosot tajam, mulai dari aksi ambil untung (*profit taking*) oleh para pelaku pasar uang serta tingginya permintaan dolar Amerika Serikat oleh perusahaan domestik untuk membayar hutang-hutang luar negeri mereka yang telah jatuh tempo.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, International Monetary Fund (IMF) kemudian masuk ke Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang bergejolak yang selain disebabkan oleh Krisis Asia yang terjadi pada tahun 1998 juga oleh kondisi sosial politik dalam negeri yang tidak menentu. Namun demikian, kerjasama dengan IMF ini tidak langsung membuahkan hasil, kondisi perekonomian makin tidak terkendali dimana rupiah semakin merosot hingga ke level Rp.16.000,00 per dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat meningkatnya derajat ketidakpastian pada aktivitas bisnis dan ekonomi di Indonesia saat itu.

2.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Mata Uang

Keseimbangan nilai tukar mata uang akan berubah setiap waktu sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran mata uang tersebut di pasar valuta asing.

Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang akan berpengaruh pula pada perubahan nilai tukar mata uang tersebut.

Madura (2008) menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, yaitu:

a. Perubahan tingkat inflasi relatif

Perubahan tingkat inflasi relatif antara satu negara dengan negara lainnya akan dapat berdampak pada aktifitas perdagangan internasional. Perubahan aktifitas perdagangan internasional ini akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Hal ini kemudian akan pula mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.

b. Perubahan tingkat suku bunga relatif

Perubahan tingkat suku bunga relatif antara satu negara dengan negara lainnya akan dapat berdampak pada investasi asing. Perubahan investasi asing ini akan akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Hal ini kemudian akan pula mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.

c. Perubahan tingkat pendapatan relatif

Perubahan tingkat pendapatan relatif antara satu negara dengan negara lainnya akan dapat berdampak pada tingkat permintaan ekspor dan impor negara tersebut. Perubahan permintaan ekspor dan impor ini akan akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran mata uang negara tersebut. Hal ini kemudian akan pula mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.

d. Pengendalian pemerintah

Pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang dengan berbagai kebijakan, diantaranya: (1) menetapkan pembatasan nilai tukar mata uang (*exchange rate barriers*), (2) menetapkan pembatasan perdagangan luar negeri (*foreign trade barrier*), (3) melakukan intervensi pada pasar valuta asing dengan melakukan pembelian dan penjualan mata uang secara langsung di pasar, (4) mempengaruhi variabel-variabel makro, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pendapatan.

e. Ekspektasi masa depan

Sebagaimana pada pasar keuangan lainnya, ekspektasi masa depan dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang pada pasar valuta asing. Umumnya ekspektasi pasar ini didasarkan atas kemungkinan terjadinya perubahan tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi suatu negara di masa depan. Kemudian,

spekulator dapat memanfaatkan hal ini untuk mengambil posisi yang berakibat langsung pada perubahan nilai tukar mata uang.

2.2. Variabel-Variabel Makroekonomi Lain

2.2.1. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Rahardja, 2008). Dari definisi ini, terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi agar suatu kondisi dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan harga ini terus meluas kepada barang-barang lainnya.

Rahardja (2008) memaparkan terdapat beberapa indikator makroekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu antara lain:

a. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)* adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar ratusan komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional yaitu dengan memperhitungkan tingkat inflasi kota-kota besar terutama ibukota provinsi-provinsi di Indonesia.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c. Indeks Harga Implisit (IHI)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang terbatas karena kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa ratus jenis barang dan jasa di beberapa puluh kota saja. Padahal dalam kenyataannya, jenis barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dalam sebuah

perekonomian dapat mencapai ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu jenis. Selain itu, kegiatan ekonomi juga terjadi tidak hanya di beberapa kota saja, melainkan di seluruh pelosok wilayah. Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, para ekonom menggunakan Indeks Harga Implisit (IHI) atau disebut juga *GDP Deflator*.

2.2.2. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga (*interest rate*) adalah harga atau biaya kesempatan (*opportunity cost*) atas penggunaan dana atau uang yang harus dibayar karena daya beli (*purchasing power*) dana tersebut pada saat sekarang. Bagi pengguna dana atau peminjam, tingkat suku bunga adalah biaya untuk penggunaan dana lebih awal, sedangkan bagi yang meminjamkan dana atau investor, tingkat suku bunga adalah pendapatan karena penundaan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut (Kidwell, 2005). Terdapat berbagai tingkat suku bunga dalam perekonomian, antara lain suku bunga kredit komersial, suku bunga kredit konsumsi, suku bunga berbagai berbagai jenis obligasi, dsb.

Menurut Mishkin (2004), tingkat suku bunga mempunyai dampak pada kesehatan perekonomian suatu negara. Peningkatan tingkat suku bunga akan menyebabkan penggunaan dana saat ini menjadi lebih mahal dan menjadi pendorong bagi investor untuk menabung. Sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga menyebabkan penggunaan dana saat ini menjadi lebih murah dan menjadi pendorong bagi peminjam.

2.2.3. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat (Rahardja, 2008). Berdasarkan sisi penawaran uang (*money supply*), para ekonom mengelompokkan uang beredar ke dalam dua jenis, yaitu M_1 dan M_2 . M_1 adalah uang sempit (*narrow money*) atau uang transaksi, maksudnya adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas, dan uang giral, yaitu uang dalam rekening koran yang dapat diambil setiap waktu. M_2 lebih luas lagi dari M_1 , yaitu M_1 ditambah dengan tabungan, deposito berjangka dan *mutual funds*. Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di bank, baik bank

umum maupun bank sentral, serta uang kertas dan uang logam milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar.

Menurut Rahardja (2008) perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertumbuh dan berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, namun komposisinya berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal makin sedikit, digantikan dengan uang giral. Biasanya juga bila perekonomian makin meningkat, komposisi M_1 dalam peredaran uang makin kecil digantikan dengan porsi uang kuasi yang makin besar.

2.3. Bank

2.3.1. Pengertian Perbankan dan Bank

Dalam Booklet Perbankan Indonesia 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU no.7 tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU no.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mendefinisikan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dll.

Rose (2002) mendefinisikan bank berdasarkan fungsinya yaitu bank merupakan intermediasi keuangan dalam menerima dana dari pihak luar dan memberikan pinjaman kepada sejumlah pihak tertentu yang membutuhkan, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya.

Sedangkan, Rimsky (2005) mendefinisikan bank sebagai salah satu lembaga intermediasi yang memiliki peranan penting dalam pola pergerakan arus modal pada perekonomian Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, serta melakukan pelayanan jasa keuangan lainnya terkait dengan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

2.3.2. Klasifikasi Bank

Berdasarkan fungsi dan tujuan operasionalnya, bank dapat dibagi menjadi:

a. Bank sentral

Bank sentral memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian makro. Bank sentral melakukan fungsinya dengan melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap sektor perbankan. Bank yang menjalankan fungsi bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.

b. Bank komersial

Bank komersial memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan bank komersial dapat diperoleh dari *spread* antara suku bunga pinjaman dan suku bunga penempatan dana pihak ketiga.

Bank komersial di Indonesia berdasarkan cakupan kegiatan operasionalnya, dapat dibagi menjadi:

a. Bank umum

Bank umum merupakan bank yang dalam kegiatannya dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dimana kegiatan BPR hanya dibatasi pada intermediasi keuangan saja. Oleh karena itu, BPR biasanya hanya beroperasi pada wilayah terbatas dan memiliki jumlah asset yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum.

Berdasarkan tata cara pengelolaan kegiatan operasionalnya, bank dapat dibagi menjadi:

- a. Bank konvensional
- b. Bank syariah

Perbedaan mendasar antara kedua jenis bank ini adalah bank syariah mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana salah satunya adalah dengan tidak menerapkan sistem bunga, namun berdasarkan bagi hasil sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengharamkan riba (bunga).

Berdasarkan status kepemilikannya, bank di Indonesia dibedakan menjadi:

- a. Bank persero / Bank BUMN

Bank persero, atau juga sering disebut sebagai Bank BUMN, adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

- b. Bank pemerintah daerah

Bank pemerintah daerah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

- c. Bank swasta nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

- d. Bank asing

Bank asing adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pihak asing yang membuka kantor cabangnya di Indonesia, dimana kantor pusatnya berada di luar negeri..

- e. Bank campuran

Bank campuran adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki pihak asing dan swasta nasional.

Berdasarkan perizinan untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki perizinan untuk dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing.

- b. Bank non devisa

Bank non devisa adalah bank yang tidak memiliki perizinan untuk dapat melakukan transaksi dalam mata uang asing dan hanya menggunakan satu jenis mata uang (rupiah) dalam transaksi perbankan.

2.3.3. Fungsi Bank Umum

Bank umum memiliki fungsi pokok sbb.:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi;
- b. Menciptakan uang;
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat;
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

2.3.4. Kegiatan Usaha Bank Umum

Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam UU no.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan UU no.7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kegiatan sbb.:

a. Kegiatan penghimpunan dana

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana antara lain dapat berupa:

- giro (*demand deposits*);
- deposito berjangka (*time deposits*);
- sertifikat deposito (*certificate of deposits*);
- tabungan (*savings deposits*);
- bentuk simpanan lainnya, misalnya *deposit on call*;
- menerbitkan atau menjual surat pengakuan hutang, baik jangka pendek, misalnya wesel, promes (*promissory notes*), atau *commercial paper*, maupun jangka panjang, misalnya obligasi (*bonds*);
- menerima pinjaman dana dari bank lain (*interbank borrowing*);
- menjual surat-surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual putus (*outright*) atau dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*);
- menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) dan *Floating Rate Notes* (FRN);
- simpanan dalam rangka program pensiun (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

b. Kegiatan penyaluran atau penggunaan dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak lain antara lain dapat berupa:

- pemberian kredit (*loan*) dengan sistem konvensional;
- menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- membeli surat-surat wesel termasuk akseptasi bank (*banker's acceptance*)

- membeli surat pengakuan hutang jangka pendek, misalnya promes (*promissory notes*), akseptasi bank (*banker's acceptance*), wesel (*bill of exchange*), atau *commercial paper*;
 - membeli surat berharga jangka panjang, misalnya obligasi korporasi (*corporate bonds*);
 - membeli surat berharga dengan janji menjual kembali (*reverse repo*);
 - menempatkan dana bank lain berupa *interbank call money*, *deposit on call*, deposito berjangka (*time deposits*), dan sertifikat deposito (*certificate of deposits*);
 - membeli Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*);
 - membeli Obligasi Negara (*Treasury Bonds*);
 - penempatan pada Bank Indonesia berupa Setifikat Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), di samping untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum;
 - memberikan pembiayaan anjak piutang;
 - melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, modal ventura, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
- c. Pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran
- Di samping kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank umum juga menyediakan jasa-jasa tertentu, terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran, yang meliputi:
- pemindahan uang (transfer dana) baik secara manual maupun secara *online* atau *electronic*;
 - menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*);
 - menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*);
 - melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*);
 - bertindak sebagai wali amanat (*trustee*);
 - memberikan jaminan *letter of credit* (L/C);
 - memberikan bank garansi;

- bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia;
- bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penerbitan obligasi;
- memberikan pelayanan *financial advisory*;
- bertindak sebagai *arranger* dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, misalnya *commercial paper*;
- memberikan jasa pengelolaan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut (*factoring*);
- bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
- memberikan pelayanan penukaran uang (*money changer*);
- memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM (*Automated Teller Machine*), kartu debit (*debit card*), dan kartu kredit (*credit card*);
- menerbitkan *draft*, yaitu surat perintah bayar yang tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada bank korespondennya;
- menerbitkan cek perjalanan (*traveler's check*).

2.3.5. Laporan Keuangan Bank Umum

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan betuk dan cakupan yang terdiri dari:

- a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi.

Laporan Keuangan Bank dibuat dan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 tentang Akuntansi Perbankan, dan PSAK yang terkait misalnya PSAK No.55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai, PSAK No.54 tentang Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah, dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang merupakan referensi bank dalam menyusun laporan keuangannya.

Secara umum, Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum yang dipublikasikan pada *website* Bank Indonesia, antara lain sbb.:

a. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca Bank Umum meliputi pos-pos sisi aktiva (*assets*) dan pasiva (*liabilities*) yang disusun berdasarkan tingkat kelancarannya sesuai dengan standar akuntansi secara umum sbb.:

Aktiva:

- Kas

Pos ini meliputi semua uang kas, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri.

- Penempatan Pada Bank Indonesia

Pos ini meliputi saldo giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia, Serifikat Bank Indonesia dan *Call Money* pada Bank Indonesia atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan penempatan lainnya pada Bank Indonesia.

- Giro Pada Bank Lain

Pos ini meliputi saldo giro bank yang bersangkutan pada bank lainnya baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

- Penempatan Pada Bank Lain

Pos ini meliputi semua dana yang ditempatkan pada bank lain dalam bentuk *Interbank Call Money*, Tabungan, *Deposit on Call*, Deposito Berjangka, serta Sertifikat Deposito pada bank lain baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

- Surat Berharga Yang Dimiliki

Pos ini meliputi semua surat berharga dalam rupiah atau valuta asing yang dimiliki bank. Klasifikasi Surat Berharga yang dimiliki dapat dibedakan menurut tujuan kepemilikannya yaitu: Diperdagangkan, Tersedia Untuk Dijual, dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo. Untuk Surat Berharga dalam kelompok klasifikasi Diperdagangkan dan Tersedia Untuk Dijual, disajikan sebesar nilai wajarnya. Sedangkan untuk Surat Berharga dalam kelompok klasifikasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo nilainya didasarkan atas biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto. Surat Berharga yang dimiliki antara lain berupa Promes, Wesel, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper* /

CP), *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), Reksadana, Obligasi, dsb.

- Obligasi Pemerintah

Pos ini meliputi semua obligasi terbitan pemerintah (Obligasi Negara) yang dimiliki bank baik dalam rangka rekapitalisasi perbankan maupun penjualan melalui lelang. Obligasi Negara tersebut dibedakan menurut tujuan kepemilikannya yaitu: Dipergadangkan, Tersedia Untuk Dijual, dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo.

- Surat Yang Dibeli Dengan Janji Dapat Dijual Kembali (*Reverse Repo*)

Pos ini meliputi transaksi jual beli surat berharga dimana bank berjanji menjual kembali surat berharga yang dibeli tersebut kepada penjual sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*reverse repo*). Transaksi ini terdiri dari rupiah dan valuta asing.

- Tagihan Derivatif

Pos ini meliputi transaksi yang berupa tagihan yang timbul dari transaksi derivatif.

- Kredit Yang Diberikan

Pos ini terdiri dari saldo (*outstanding*) kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait dengan bank dalam rupiah dan valuta asing. Kredit dapat diberikan dengan perjanjian kredit maupun tanpa perjanjian kredit.

- Tagihan Akseptasi

Pos ini berasal dari tagihan akseptasi kepada pihak lain.

- Penyertaan

Pos ini merupakan penyertaan dana kepada bank lain dan lembaga keuangan bukan bank.

- Pendapatan Yang Masih Akan Diterima

Pos ini antara lain meliputi pendapatan bunga yang akan diterima.

- Biaya Dibayar Dimuka

Pos ini memuat beban yang telah dibayar di muka.

- Uang Muka Pajak

Pos ini memuat pajak yang dibayar di muka.

- Aktiva Pajak Tangguhan

Pos ini memuat pajak tangguhan.

- Aktiva Tetap
Pos ini meliputi nilai tanah, gedung, dan inventaris yang dimiliki bank.
- Aktiva Sewa Guna Usaha
Pos ini meliputi aktiva yang diperoleh atas sewa guna usaha.
- Agunan Yang Diambil Alih
Pos ini meliputi agunan yang diambil alih oleh bank.
- Aktiva Lain-Lain
Yang dimasukkan dalam pos ini adalah: emas dan mata uang emas, *commemorative coin*, margin deposit, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, cek perjalanan (*travellers' check*) yang dibeli/diambil alih, aktiva mubarah, tagihan inkaso, talangan dalam rangka program pemerintah, dana pelunasan obligasi, *goodwill*, hasil *offsetting* kredit antar kantor pasiva dan antar kantor aktiva.

Pasiva:

- Giro
Pos ini meliputi semua saldo giro dalam rupiah dan valuta asing milik masyarakat dalam bentuk giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu, giro dalam rangka kustodian, giro yang diblokir dalam rangka *escrow account* dan setoran jaminan.
- Kewajiban Segera Lainnya
Pos ini meliputi kewajiban kepada pemerintah yang belum dipindahbukukan, bunga simpanan berjangka yang telah jatuh tempo dan transfer.
- Tabungan
Pos ini meliputi semua saldo dalam bentuk tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tabungan berjangka.
- Simpanan Berjangka
Pos ini meliputi simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki oleh pihak terkait dengan bank dan pihak lain yaitu *Deposit On Call* dan Deposito Berjangka lainnya.
- Sertifikat Deposito
Pos ini berisi sertifikat deposito yang diterbitkan bank dalam rupiah dan valuta asing.
- Simpanan Dari Bank Lain

Pos ini meliputi semua kewajiban ke bank lain dalam bentuk Giro, *Interbank Call Money*, Tabungan, *Deposit On Call*, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito.

- Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (*Repo*)

Pos ini meliputi transaksi jual beli surat berharga dimana bank berjanji membeli kembali surat berharga yang dijualnya tersebut dari pembeli sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*reverse repo*). Transaksi ini terdiri dari rupiah dan valuta asing.

- Kewajiban Derivatif

Pos ini meliputi semua transaksi derivatif yang mengakibatkan timbulnya kewajiban.

- Kewajiban Akseptasi

Pos ini berisi kewajiban yang timbul dari akseptasi bank.

- Surat Berharga Yang Diterbitkan

Pos ini meliputi semua kewajiban yang antara lain berasal dari penerbitan surat berharga oleh bank dalam rupiah atau valuta asing. Surat Berharga yang diterbitkan antara lain berupa Promes, Wesel, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper / CP*), *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), Reksadana, Obligasi, Cek Perjalanan (*Travellers' Check*), dsb.

- Pinjaman Yang Diterima

Pos ini berisi kewajiban baik kepada Bank Indonesia berupa Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, Kredit Likuiditas BI dalam rangka KUK, Pinjaman *Two Step Loan*, Fasilitas Diskonto, Surat Berharga Pasar Uang, Talangan Utang dan Perdagangan Luar Negeri dan kepada pihak lainnya dengan bank maupun pihak lain dalam rupiah dan valuta asing.

- Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontijensi

Pos ini berisi penyisihan penghapusan untuk transaksi rekening administratif.

- Kewajiban Sewa Guna Usaha

Pos ini berisi kewajiban yang berasal dari sewa guna usaha (*leasing*).

- Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pos ini meliputi semua kewajiban kepada bank dan pihak lain berupa beban bunga yang masih harus dibayar.

- Taksiran Pajak Penghasilan

Pos ini berisi kewajiban pajak penghasilan bank berdasarkan perkiraan.

- Kewajiban Pajak Tangguhan
Pos ini berisi kewajiban pajak bank yang ditangguhkan.
- Kewajiban Lain-Lain
Pos ini meliputi kewajiban lain berupa dividen yang belum dibayar, setoran jaminan dalam transaksi perdagangan, kewajiban karena transaksi perdagangan, hasil *offsetting* kredit antar kantor pasiva dan antar kantor aktiva.
- Pinjaman Subordinasi
Pos ini berisi kewajiban bank kepada pihak terkait dengan bank dan pihak lain dalam rangka pinjaman subordinasi.
- Modal Pinjaman
Pos ini berisi kewajiban bank kepada pihak terkait dengan bank lain berupa modal pinjaman.
- Hak Minoritas
Pos ini berisi nilai kepemilikan bank pada perusahaan lain. Pos ini hanya diisi untuk kolo konsolidasi.
- Ekuitas
Yang dimasukkan dalam pos ini antara lain: modal disetor, agio/disagio, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba/rugi yang belum direalisasi dari surat berharga, pendapatan komprehensif lainnya, saldo laba/rugi.

b. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Perhitungan laba rugi dan saldo laba bank pada dasarnya disusun dengan mengelompokkan pendapatan dan beban atau biaya ke dalam Pendapatan dan Beban Operasional dan Pendapatan dan Beban Non Operasional.

Pendapatan dan Beban Operasional:

- Pendapatan Bunga
Pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam rupiah dan valuta asing dalam aktivitas operasionalnya. Pos ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit. Pendapatan operasional bank yang berupa hasil bunga diperoleh antara lain dari Bank Indonesia, dari bank lain berupa Giro, *Interbank Call Money*, Simpanan Berjangka, Surat Berharga, Kredit yang Diberikan, Tabungan, dll, serta dari pihak ketiga bukan bank berupa Surat Berharga, Kredit yang Diberikan, dll.

- **Beban Bunga**
Pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga dalam rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dalam pos ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi / provisi pinjaman. Beban operasional bank berupa beban bunga dibayarkan antara lain kepada Bank Indonesia, kepada bank lain berupa Giro, *Interbank Call Money*, Simpanan Berjangka, Pinjaman yang Diterima, Tabungan, dll, serta kepada pihak ketiga bukan bank berupa Giro, Simpanan Berjangka, Pinjaman yang Diterima, Tabungan, Surat Berharga, dll
- **Pendapatan Operasional Lainnya**
Pos ini berisi pendapatan operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, dan pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
- **Beban / Pendapatan Penghapusan Aktiva Produktif**
Pos ini berisi penyusutan / amortisasi / penghapusan yang dilakukan bank terhadap aktiva produktif bank yaitu kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi dan transaksi derivatif, penyertaan, dll.
- **Beban Estimasi Kerugian Komitmen Dan Kontinjensi**
Pos ini berisi penyusutan / amortisasi / penghapusan atas transaksi rekening administratif.
- **Beban Operasional Lainnya**
Pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu berupa beban administrasi dan umum, beban personalia, beban penurunan nilai surat berharga, beban transaksi valuta asing, beban lainnya.

Pendapatan dan Beban Non Operasional:

- **Pendapatan Non Operasional**
Pos ini berisi pendapatan yang diterima bank dari aktivitas non operasional seperti sewa, keuntungan penjualan aktiva tetap dan inventaris, selisih kurs, hasil *offsetting* kredit rekening antar kantor dan bunga antar kantor, dll.
- **Beban Non Operasional**

Pos ini berisi beban non operasional seperti kerugian penjualan aktiva tetap dan inventaris, denda / sanksi, selisih kurs, hasil *offsetting* debit rekening antar kantor, dll.

- Pendapatan / Beban Luar Biasa

c. Daftar Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi pada dasarnya adalah kegiatan usaha bank yang bersifat administratif yang terdiri dari tagihan dan kewajiban komitmen serta tagihan dan kewajiban kontinjensi.

Komitmen:

- Tagihan Komitmen

Pos ini berisi fasilitas pinjaman yang diterima bank dalam rupiah dan valuta asing yang belum digunakan. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik terdiri dari pinjaman kepada Bank Indonesia, bank dalam negeri, bank luar negeri, dll.

- Kewajiban Komitmen

Pos ini terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah dalam rupiah dan valuta asing yang belum ditarik yaitu oleh BUMN dan bank lain, serta *Irrevocable L/C* yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor yang terdiri dari dalam negeri dan luar negeri.

Kontinjensi:

- Tagihan Kontinjensi

Pos ini berisi tagihan kontinjensi dalam rupiah dan valuta asing yang terdiri dari garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, dll.

- Kewajiban Kontinjensi

Pos ini berisi kewajiban kontinjensi dalam rupiah dan valuta asing yang terdiri dari garansi yang diberikan seperti *shipping guarantee*, *risk sharing*, dan *stand by L/C*, serta *Revocable L/C* yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor yang terdiri dari dalam negeri dan luar negeri.

d. Kualitas Aktiva Produktif

Dalam ketentuan kualitas aktiva bank umum, aset yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif mencakup Kredit, Surat Berharga, Penempatan Dana Antar Bank, Tagihan Akseptasi, *Reverse Repurchase Agreement* atau *Reverse Repo*, Tagihan Derivatif, Penyertaan Modal, Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya.

Sedangkan, aktiva non produktif mencakup Agunan Yang Diambil Alih, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan *Suspense Account*.

Bank Indonesia menggolongkan kualitas aktiva produktif ke dalam lima tingkatan berdasarkan kriteria kualitatif dan kuantitatif. Urutan dari kualitas yang terbaik yaitu: (1) Lancar (L), (2) Dalam Perhatian Khusus (DPK), (3) Kurang Lancar (KL), (4) Diragukan (D), dan (5) Macet. Standar kuantitatif yang umum digunakan adalah kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran bunga dan hutang pokok. Semakin buruk kualitas aktiva produktif maka semakin sedikit pendapatan bunga oleh bank karena ketentuan akuntansi yang tidak memperbolehkan pencatatan cadangan bunga secara *accrual basis* untuk kualitas aktiva mulai dari urutan kualitas aktiva ke-3 ke bawah. Semakin buruk kualitas aktiva produktif maka semakin besar pula kewajiban untuk pembedakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

e. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki tingkat *financial leverage* yang tinggi. Resiko-resiko yang tinggi sebagai lembaga perantara keuangan menghadapkan bank pada kemungkinan kerugian yang dapat mengurangi modal bank dan akan berakibat pada ketidakmampuan bank untuk menyelesaikan kewajibannya pada masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan dan pada akhirnya akan dapat memberikan pengaruh buruk pada perekonomian nasional.

Dalam hal ini modal bank memegang peranan yang penting sebagai penggerak kegiatan operasional bank, karena besar kecilnya modal yang dimiliki bank akan berpengaruh pada kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Modal bank yang besar akan memberikan gambaran mengenai kemampuan bank yang besar pula dalam menghadapi resiko-resiko yang akan terjadi. Sebaliknya modal bank yang kecil menggambarkan keterbatasan kemampuan bank dalam menghadapi resiko-resiko tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai regulator perbankan menetapkan suatu rasio kecukupan modal yang disebut dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Rasio ini merupakan rasio perbandingan jumlah modal dengan jumlah aktiva. Aktiva dalam hal ini adalah dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang terdiri atas: (1) aktiva neraca yang diberikan robot sesuai kadar resiko kredit yang melekat pada setiap pos aktiva,

dan (2) beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontijensi (*off-balance sheet account*) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar resiko kredit yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank Umum wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

f. Rasio Keuangan

Rasio keuangan dalam laporan keuangan bank sebagaimana dalam laporan keuangan perusahaan lain digunakan sebagai alat perbandingan kinerja bank tersebut relatif terhadap kinerja bank lainnya. Rasio-rasio keuangan yang umum digunakan dalam laporan keuangan bank antara lain:

- Rasio Permodalan, yaitu: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Aktiva Tetap Terhadap Modal, dll.
- Rasio Aktiva Produktif, yaitu: Aktiva Produktif Bermasalah, *Non Performing Loan* (NPL), PPAP Terhadap Aktiva Produktif, Pemenuhan PPAP, dll.
- Rasio Rentabilitas, yaitu: *Return On Average Assets* (ROAA), *Return On Average Equity* (ROAE), *Net Interest Margin* (NIM), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dll.
- Rasio Likuiditas, yaitu: *Loan Deposit Ratio* (LDR), dll.
- Rasio Kepatuhan, yaitu: Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Persentase Pelampauan BMPK, Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Neto (PDN), dll.

2.3.6. Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum dan Sistem CAMELS

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan, bagi regulator perbankan antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank. Rasio-rasio keuangan sering kali digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank serta kualitas dari manajemennya.

Pada awal tahun 1970an, regulator bank federal di Amerika Serikat mengembangkan sistem CAMEL, yang merupakan singkatan dari *Capital Adequacy*,

Asset Quality, Management Quality, Earnings Ability, and Liquidity, sebagai sistem rating untuk melakukan proses penilaian kinerja perbankan. Pada tahun 1979, Keseragaman Sistem Rating Lembaga Keuangan (*Uniform Financial Institutions Rating System*) ditetapkan sebagai kerangka penilaian kondisi dan kinerja keuangan dari masing-masing bank bagi regulator bank federal (Siems dan Barr, 1998). Sejak saat itu, penggunaan penilaian faktor-faktor CAMEL dalam mengevaluasi tingkat kesehatan keuangan perbankan semakin luas digunakan.

Di Indonesia, penerapan CAMEL(S) sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari: permodalan (*Capital*), kualitas aset (*Asset quality*), manajemen (*Management*), profitabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Penjelasan mengenai penilaian faktor-faktor CAMELS sebagai sarana penilaian kondisi dan kinerja keuangan perbankan adalah sbb.:

a. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sbb.:

- 1) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang dihitung berdasarkan formula sbb.:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko}}$$

- 2) Komposisi permodalan

Komposisi permodalan yang dihitung berdasarkan formula sbb.:

Tier 1 (Modal Inti)

Tier 2 (Modal Pelengkap) + Tier 3 (Modal Pelengkap Tambahan)

- 3) *Trend* ke depan dibandingkan dengan proyeksi KPMM yaitu dimana *trend* rasio KPMM dan atau persentase pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ATMR.
- 4) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank.
- 5) Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan), menggunakan indikator pendukung seperti:

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Dividen yang dibagi}}{\text{Laba Setelah Pajak}}$$

$$\text{Retention Rate} = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Modal Rata-Rata}}$$

- 6) Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, dengan indikator pendukung seperti persentase rencana pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase rencana pertumbuhan volume usaha.
- 7) Akses kepada sumber permodalan, dengan indikator pendukung seperti:

$$\text{Earning Per Share (EPS)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham}}$$

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{EPS}}$$

Selain itu, juga menggunakan indikator pendukung lain seperti indikator profitabilitas (ROA dan ROE), peringkat bank atau surat utang dari lembaga pemeringkat (apabila ada) misalnya Pefindo, Standard & Poor's, Moody's dan Fitch, serta indikator kinerja saham dan obligasi dan kinerja *subscription level*.

- 8) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank, dengan indikator pendukung seperti kondisi keuangan pemegang saham, peringkat perusahaan pemegang saham, *core business* pemegang saham, *track record* pemegang saham.

b. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sbb.:

- 1) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif.
- 2) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- 3) Perkembangan aktiva produktif bermasalah / *non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif.
- 4) Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dihitung berdasarkan formula sbb.:

$$\frac{\text{PPAP Yang Telah Dibentuk}}{\text{PPAP Yang Wajib Dibentuk}}$$

- 5) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif dengan indikator pendukung seperti keterlibatan pengurus bank dalam menyusun dan menetapkan kebijakan aktiva produktif serta memonitor pelaksanaannya, konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan, tujuan dan strategi usaha bank, serta kecukupan sistem dan prosedur.
- 6) Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif dengan indikator pendukung seperti review frekuensi, review independen, ketaatan terhadap regulasi internal dan eksternal, sistem informasi aktiva produktif, serta proses keputusan manajemen.
- 7) Dokumentasi aktiva produktif dengan indikator pendukung seperti kelengkapan dokumen dan kemudahan *audit trail*, sistem penatausahaan dokumen, serta *back up* dan penyimpanan dokumen.
- 8) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah dengan indikator pendukung yaitu perbandingan kredit yang direstruktur dengan total kredit, perbandingan kredit yang direstruktur lancar dan DPK dengan kredit yang direstruktur, perbandingan kredit bermasalah dikurangi dengan PPAP dengan total kredit, perbandingan penyertaan modal sementara kualitas lancar & DPK dengan penyertaan modal sementara, perbandingan agunan yang diambil alih dengan total kredit, kualitas penanganan aktiva produktif bermasalah, *review* terhadap independensi unit kerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

c. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sbb.:

- 1) Manajemen umum dimana dinilai dari praktek *Good Corporate Governance* antara lain sbb.:
 - Struktur dan komposisi pengurus bank;
 - Penanganan *conflict of interest*;
 - Independensi pengurus bank;
 - Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas *good corporate governance*;
 - Transparansi informasi dan edukasi nasabah; dan
 - Efektifitas kinerja fungsi komite.
- 2) Penerapan sistem manajemen risiko dinilai berdasarkan 4 (empat) cakupan yaitu sbb.:
 - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko; dan
 - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 3) Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya dengan indikator kepatuhan pada Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC Principles*), serta kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya.

d. Profitabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor profitabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen- komponen sbb.:

- 1) *Return On Average Assets* (ROAA)

$$\text{ROAA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

- 2) *Return On Average Equity* (ROAE)

$$\text{ROAE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Modal Inti}}$$

3) *Net Interest Margin* (NIM)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}}$$

4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$$

5) Perkembangan laba operasional

$$\text{Pendapatan Operasional} - \text{Beban Operasional}$$

6) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan dengan indikator pendukung seperti komposisi portofolio aktiva produktif dibandingkan dengan komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif (*series*), dan *fee based income ratio* yaitu perbandingan pendapatan operasional di luar pendapatan bunga dengan pendapatan operasional.

7) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dengan indikator pendukung seperti konsistensi pengakuan pendapatan bunga yang berkaitan dengan kualitas aktiva produktif dan metodologi akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya.

8) Prospek laba operasional dengan indikator pendukung yaitu hasil *stress test* proyeksi laba operasional berdasarkan rencana bisnis.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sbb.:

1) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.

2) *1-month maturity mismatch ratio* yang dihitung berdasarkan formula sbb.:

$$\frac{\text{Selisih Aktiva dan Pasiva Yang Akan Jatuh Tempo 1 Bulan}}{\text{Pasiva Yang Akan Jatuh Tempo 1 Bulan}}$$

3) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

- 4) Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang yang dihitung berdasarkan formula sbb.:

Net Cash Flow

Dana Pihak Ketiga

- 5) Ketergantungan pada dana antar bank dan deposit inti dengan indikator pendukung seperti perbandingan pasiva antar bank dengan total dana dan perbandingan deposit inti dengan dana pihak ketiga.
- 6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*) dengan indikator pendukung seperti kecukupan *Contingency Funding Plan*, kesesuaian kebijakan dengan struktur asset dan liabilities, kecukupan penetapan dan prosedur limit, serta kecukupan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang.
- 7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya dengan indikator pendukung seperti peringkat bank, Persyaratan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), *track record* dan ketersediaan *money market line (credit line)*, suku bunga PUAB dibandingkan dengan suku bunga PUAB yang dikenakan pada bank.
- 8) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK) dengan indikator pendukung seperti pertumbuhan DPK dan pertumbuhan deposit inti.
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sbb.:

- 1) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
- 3) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar dengan indikator pendukung seperti pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Bank terhadap potensi eksposur risiko pasar, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko pasar, kecukupan proses identifikasi, pengukuran,

pemantauan dan pengendalian resiko pasar dan sistem informasi manajemen resiko pasar, serta efektivitas pelaksanaan pengendalian intern (*internal control*) terhadap eksposur resiko pasar termasuk kecukupan fungsi audit intern.

2.3.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja bank. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam bank atau faktor internal dan dapat pula bersumber dari luar bank atau faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dalam beberapa penelitian sebelumnya terbukti dapat mempengaruhi kinerja bank adalah faktor makroekonomi.

Variabel-variabel makroekonomi yang dinilai memiliki pengaruh pada kinerja bank antara lain: tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, jumlah uang beredar, serta nilai tukar mata uang asing. Penelitian tentang hubungan tingkat inflasi dengan kinerja bank dilakukan salah satunya oleh John H. Boyd (2006) yang menemukan bahwa inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, dimana ketika terjadi inflasi tingkat lending berkurang sehingga pendapatannya juga berkurang. Penelitian tentang hubungan tingkat suku bunga pasar dengan kinerja bank dilakukan oleh Diamond (1991) dan Demirguc-Kunt dan Huizinga (1999) yang menemukan bahwa tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas bank, dimana tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan gagal bayar dari peminjam sehingga akan mengurangi profit bank. Penelitian tentang hubungan jumlah uang yang beredar dengan kinerja bank salah satunya dilakukan oleh Barajas et al (1999) yang menemukan hubungan yang kuat antara pertumbuhan jumlah uang yang beredar terhadap profitabilitas bank, dimana dalam kondisi jumlah uang beredar yang banyak kemampuan bank mengucurkan kredit meningkat sehingga pendapatan bank akan bertambah. Penelitian tentang hubungan nilai tukar mata uang asing dengan kinerja bank salah satunya dijabarkan oleh Hardy dan Pazarbasioglu (1998) yang menemukan bahwa apresiasi nilai tukar yang disertai dengan depresiasi yang tajam merupakan salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan pada perbankan di Asia. Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian tentang hubungan variabel-variabel makroekonomi terhadap kinerja dan profitabilitas bank di Indonesia oleh Djayasaputra (2007) dan Arsani (2007) yang menyatakan bahwa pengaruh variabel-variabel makroekonomi tersebut berbeda pada masing-masing bank.